

**ARAHAN PERAN PEMUDA DALAM STRATEGI PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN DAN EKONOMI KELUARGA NELAYAN
(STUDI KASUS: PERMUKIMAN NELAYAN PAJUKUKANG,
KECAMATAN BONTOA, KABUPATEN MAROS)**

*DIRECTION OF YOUTH'S ROLE IN SETTLEMENT QUALITY
IMPROVEMENT AND ECONOMY OF FISHERMAN FAMILIES
STRATEGIES*

*(CASE STUDY: PAJUKUKANG FISHERMAN SETTLEMENT, BONTOA
DISTRICT, MAROS REGENCY)*

VERA VEBRIANI

P022181015



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

**ARAHAN PERAN PEMUDA DALAM STRATEGI PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN DAN EKONOMI KELUARGA NELAYAN
(STUDI KASUS: PERMUKIMAN NELAYAN PAJUKUKANG,
KECAMATAN BONTOA, KABUPATEN MAROS)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

VERA VEBRIANI

Kepada

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

TESIS

**ARAHAN PERAN PEMUDA DALAM STRATEGI PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN DAN EKONOMI KELUARGA NELAYAN
(STUDI KASUS: PERMUKIMAN NELAYAN PAJUKUKANG, KECAMATAN BONTOA,
KABUPATEN MAROS)**


Disusun dan diajukan oleh

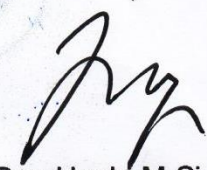
VERA VEBRIANI
Nomor Pokok P022181015

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 31 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui


Komisi Penasehat,



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si
Ketua


Drs. Hasbi, M.Si., PhD
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng


Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VERA VEBRIANI
Nomor Mahasiswa : P022181015
Program Stuid : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Agustus 2020

Yang menyatakan,



[Handwritten Signature]
VERA VEBRIANI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kemurahan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian Tesis yang berjudul **Arahan Peran Pemuda dalam Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman dan Ekonomi Keluarga Nelayan Pajukukang (Studi Kasus: Permukiman Nelayan Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)**.

Pada kesempatan ini penulis turut mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini. Terkhusus kepada orang tua dan saudara penulis, yang selalu mendoakan dan mendukung langkah-langkah penulis hingga saat ini. Dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si dan Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis dan pembelajaran pada Program Magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng., Ir. Ria Wikantari, M.Arch., Ph.D Dan Dr. Ir. Mimi Arifin, M.Si., selaku penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan tesis ini.
- Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah konsentrasi Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Angkatan 2018, yang telah banyak menginspirasi dan berbagi ilmu serta semangat kepada penulis.

- Teman-teman dekat yang secara langsung dan tidak langsung telah banyak menyemangati, menginspirasi, serta membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- Masyarakat Desa Pajukukang dan aparat Desa Pajukukang, yang telah menerima penulis dan bekerjasama dalam menyelesaikan pengumpulan data tesis ini;
- Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui program Beasiswa Kemenpora, yang telah memberikan bantuan pendidikan tersebut kepada penulis;
- Pihak Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah membantu menyelesaikan kebutuhan administrasi penulis.

Makassar, 31 Agustus 2020

Penulis

Vera Vebriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Permukiman	11
1. Rumah.....	11
2. Permukiman	11
3. Permukiman Kumuh	12
4. Permukiman Nelayan	15
B. Penilaian Permukiman Kumuh.....	15
1. Indikator Penilaian Tingkat Kekumuhan.....	16
2. Formulasi Penilaian Kekumuhan	22
C. Bangunan dan Prasarana Permukiman	30
1. Bangunan	30

2.	Jaringan Jalan Lingkungan	31
3.	Jaringan Drainase.....	31
4.	Jaringan Air Limbah/ Sanitasi	32
5.	Jaringan Air Bersih	34
6.	Jaringan Persampahan.....	34
7.	Proteksi Kebakaran	35
D.	Penanganan Permukiman	35
1.	Penanganan Permukiman Kumuh Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011	37
2.	Penanganan Permukiman Kumuh Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016	39
E.	TURBINLAKWAS (Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)	43
F.	Partisipasi Pemuda	44
1.	Partisipasi	44
2.	Pemuda	45
3.	Partisipasi Pemuda	46
G.	Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	48
H.	Penelitian Terdahulu	49
I.	Kerangka Konsep	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		55
A.	Jenis Penelitian.....	55
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
C.	Populasi dan Sampel.....	57
1.	Populasi.....	57
2.	Sampel	57
D.	Jenis dan Sumber Data	59
3.	Jenis Data.....	59
4.	Sumber Data	59
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	60
F.	Teknik Analisis Data	62

G.	Variabel Penelitian	62
H.	Defenisi Operasional	63
I.	Matriks Penelitian.....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		71
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
1.	Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah Desa Pajukukang ..	71
2.	Kondisi Topografi dan Penggunaan Lahan Desa Pajukukang	72
3.	Demografi Desa Pajukukang	73
4.	Gambaran Umum Lokasi Peneltian	74
5.	Sosial dan Budaya.....	77
B.	Kondisi Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan	85
1.	Kondisi Bangunan Hunian	85
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	90
3.	Kondisi Drainase Lingkungan	97
4.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	100
5.	Kondisi Penyediaan Air Minum/ Air Bersih	107
6.	Pengelolaan Persampahan.....	112
7.	Proteksi Kebakaran	117
C.	Kondisi Ekonomi Keluarga Nelayan	118
1.	Pendapatan Masyarakat	118
2.	Pola Pemenuhan Kebutuhan	119
3.	Usaha Sampingan	123
4.	Kelebihan dan Kekurangan Usaha Sampingan.....	127
5.	Potensi Usaha Lokal.....	129
D.	Kondisi Sosial Masyarakat Nelayan	130
1.	Dinamika Masyarakat Pada Permukiman Nelayan Pajukukang	131
2.	Perilaku Masyarakat Terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat ...	133
E.	Kondisi Pemuda Desa Pajukukang.....	134
1.	Perilaku Sosial Pemuda.....	134
2.	Perilaku Pemuda Terhadap Lingkungan	136
3.	Potensi Dan Permasalahan	138

F. Penilaian Tingkat Kualitas Lingkungan Permukiman	139
G. Rangkuman Hasil Analisis Kondisi Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Permukiman Nelayan Pajukukang	144
H. Analisis Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman dan Ekonomi 150	
1. Analisis SWOT Aspek Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan 150	
2. Analisis SWOT Aspek Ekonomi	155
3. Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman	160
I. Arahan Peran Pemuda Dalam Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman	167
BAB V_PENUTUP	179
A. Kesimpulan.....	179
B. Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA.....	xvii
LAMPIRAN	xxi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Formulasi Penilaian Kekumuhan.....	23
Tabel 2. Standar Pelayanan Minimal Jaringan Jalan Permukiman.....	31
Tabel 3. Banyaknya ruangan di MCK umum.....	33
Tabel 4. Kebutuhan Prasarana Persampahan	35
Tabel 5. Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Permukiman Kumuh	40
Tabel 6. Perbandingan terhadap Penelitian Terdahulu	52
Tabel 7. Populasi Berdasarkan Dusun.....	57
Tabel 8. Informan Pemelitian	61
Tabel 9. Variabel dan Indikator Penelitian.....	63
Tabel 10. Matriks Penelitian.....	67
Tabel 11. Luas Wilayah Desa Pajukukang Berdasarkan Dusun	71
Tabel 12. Jumlah Penduduk Desa Pajukukang Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Tabel 13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	73
Tabel 14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	73
Tabel 15. Luas Wilayah Penelitian.....	74
Tabel 16. Jumlah Penduduk di Wilayah Penelitian	76
Tabel 17. Jenis Mata Pencaharian Di Wilayah Penelitian	77
Tabel 18. Kondisi Bangunan Hunian.....	88
Tabel 19. Jaringan Jalan Permukiman Nelayan Pajukukang	93
Tabel 20. Kondisi Jalan Permukiman Nelayan Pajukukang	95
Tabel 21. Kondisi Drainase Permukiman Nelayan Pajukukang.....	97
Tabel 22. Ketersediaan MCK Permukiman Nelayan Pajukukang.....	101
Tabel 23. Kondisi Jaringan Air Limbah Permukiman Nelayan Pajukukang	102
Tabel 24. Sumber Air Bersih Permukiman Nelayan Pajukukang.....	108
Tabel 25. Kondisi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Permukiman Nelayan Pajukukang.....	110
Tabel 26. Pengelolaan Persampahan Permukiman Nelayan Pajukukang	112
Tabel 27. Kondisi Jaringan Persampahan Permukiman Nelayan Pajukukang.....	115
Tabel 28. Kondisi Ketersediaan Proteksi Kebakaran	118
Tabel 29. Klasifikasi Tingkat Pendapatan Keluarga Nelayan	119
Tabel 30. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Nelayan.....	120
Tabel 31. Jumlah Pelaku Usaha Sampingan Berdasarkan Jenis Usaha	127

Tabel 32. Kelebihan Dan Kekurangan Usaha Sampingan Keluarga Nelayan Pajukukang	128
Tabel 33. Faktor Pendukung dan Faktor Kendala Usaha Lokal	130
Tabel 34. Potensi dan Permasalahan Pemuda	139
Tabel 35. Penilaian Tingkat Kualitas Permukiman Nelayan Pajukukang	141
Tabel 36. Rangkuman Hasil Analisis Kondisi Permukiman dan Kondisi Ekonomi Keluarga Nelayan Pajukukang	147
Tabel 37. IFAS Peningkatan Kualitas Permukiman	151
Tabel 38. EFAS Peningkatan Kualitas Permukiman	152
Tabel 39. IFAS Peningkatan Ekonomi Keluarga Nelayan	156
Tabel 40. Peningkatan Ekonomi Keluarga Nelayan	157
Tabel 41. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Permukiman Nelayan Pajukukang	161
Tabel 42. Arah Peran Pemuda dalam Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman dan Ekonomi Keluarga	169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Permukiman Nelayan Pajukukang	56
--	----

Gambar 2. Peta Administrasi Desa Pajukukang	72
Gambar 3. Peta Permukiman Nelayan Pajukukang	75
Gambar 4. Peta Kawasan Permukiman Nelayan Pajukukang.....	75
Gambar 5. Perahu nelayan migrasi yang membawa motor dan barang bawaan lainnya.....	79
Gambar 6. Prosesi Berzanji di atas kapal oleh Nelayan Pajukukang	83
Gambar 7. Keramaian warga mengantar pemberangkatan nelayan migrasi	84
Gambar 8. Kondisi Lingkungan Permukiman Desa Nelayan Pajukukang	86
Gambar 9. Peta Kondisi Bangunan.....	89
Gambar 10. Jalan Lokal Sekunder II Desa Pajukukang	91
Gambar 11. Jalan lingkungan dengan kondisi	91
Gambar 12. Jalan Lingkungan tanpa Perkerasan	92
Gambar 13. Area yang Tidak Terlayani Jalan Lingkungan.....	92
Gambar 14. Peta Kondisi Jalan Lingkungan	96
Gambar 15. Ruas Jalan Lingkungan Dan Jalan Lokal Sekunder Yang Dilengkapi Drainase.....	98
Gambar 16. Ruas Jalan Yang Tidak Dilengkapi Drainase	99
Gambar 17. Drainase Yang Dipenuhi Sampah Dan Sisa Material, Drainase Yang Tertimbun	99
Gambar 18. Peta Kondisi Jaringan Drainase	100
Gambar 19. MCK Pribadi.....	103
Gambar 20. MCK darurat yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di atas sungai	104
Gambar 21. MCK Komunal di Dusun Panaikang (kiri) dan DusunParasangan Beru (kanan).....	105
Gambar 22. bidang resapan air limbah rumah tangga (Cammara').....	106
Gambar 23. Tangki Septik (kiri) dan Pipa Buangan Tinja ke Sungai (kanan)	106
Gambar 24. Kolam Penampungan Air Hujan Komunal (kiri) dan Wadah Penampungan Individual (kanan)	108
Gambar 25. Penjual Air Minum dan Air Bersih Keliling	109
Gambar 26. wadah penampungan air milik masyarakat	109
Gambar 27. Peta Persebaran Sumur Air Hujan	111
Gambar 28. Halaman Rumah Yang Menjadi Tempat Pembuangan Sampah	113
Gambar 29. Sampah Yang Baru Saja Dibuang Ke Sungai	114
Gambar 30. sampah ditepian empang (kiri) dan sungai (kanan)	114
Gambar 31. Peta Sebaran Penumpukan Sampah	116

Gambar 32. Pengolahan Kepiting secara Mandiri (kiri) dan Pengolahan Kepiting di Pabrik (kanan).....	124
Gambar 33. Kios Sembako Di Bawah Rumah	125
Gambar 34. Pemilik Rumah Makan Sedang Mempersiapkan Jualannya	125
Gambar 35. Salah Seorang Istri Nelayan Mengupas Kacang Mete	126
Gambar 36. Penjual Air Menjajakan Air Dengan Menggunakan Mobil Pick- Up.....	126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	xxi
Lampiran 2. Angket Penilaian Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan	ix
Lampiran 3. Panduan Wawancara	xii

ABSTRAK

VERA VEBRIANI. *Arahan Peran Pemuda dalam Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman dan Ekonomi Keluarga Nelayan (Studi Kasus: Permukiman Nelayan Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)* (dibimbing oleh Abdul Rahman Rasyid, Hasbi).

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas permukiman dan ekonomi keluarga nelayan, dan menyusun strategi peningkatan kualitas permukiman dan ekonomi keluarga nelayan Pajukukang serta memberikan arahan peran pemuda dalam strategi tersebut.

Penelitian menggunakan metode campuran dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan sifat kausal komparatif dan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari observasi, pemberian angket, wawancara, dan studi literatur, dengan variabel penelitian berupa tata bangunan dan prasarana lingkungan, sosial budaya dan ekonomi nelayan, peningkatan kualitas permukiman, dan peran nelayan muda

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas permukiman nelayan Pajukukang berada pada tingkatan kumuh sedang dengan nilai kekumuhan 54 dan rata-rata kekumuhan 62%. Strategi peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan penanganan kekumuhan melalui pola dan bentuk pencegahan serta peningkatan kondisi kualitas bangunan hunian, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran, perilaku sosial, dan ekonomi keluarga. Peran pemuda dalam strategi peningkatan kualitas permukiman nelayan di arahkan dalam bentuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan pada setiap bentuk dan pola penanganan.

Kata kunci: Kualitas Permukiman, Ekonomi Keluarga, Peran Pemuda, Nelayan Pajukukang



ABSTRACT

VERA VEBRIANI. *Direction of Youth's Role in Settlement Quality Improvement and Economy of Fisherman Families Strategies (Case Study: Pajukukang Fisherman Settlement, Bontoa District, Maros (Supervised by Abdul Rahman Rasyid and Hasbi)*

This study is to analyze the quality of settlements and the economy of fisherman's families, and then to develop strategies for improving the settlements and then to develop strategies for improving the quality of settlement and economy of Pajukukang fisherman families and to provide direction for the role of youth in the strategy.

Analyzing the quality of settlements and formulating strategies to improve the quality of settlement and the family economy, as well as the direction of the role of youth in these strategies were carried out in mixed method research with quantitative descriptive analysis with causal co-comparative and qualitative descriptive characteristics. Sources of data obtained from observation, questionnaires, interviews, and literature study. The research variables in the form of environmental were structures and infrastructure, fishermen's socio-culture and economy, improvement of settlement quality, and the role of young fishermen.

The results of this study indicate that the quality of the Pajukukang fishermen settlement is at a moderate slum level with a slum value of 54 and an average of 62% slum. The strategy for improving the quality of settlement is carried out by handling slums through patterns and forms of prevention as well as improving the quality conditions of residential buildings, environment roads, water supply, drainage, waste water management, waste management, fire protection, social behavior, and family economy. The role of youth in this strategy to improve the quality of fishermen settlements is directed in the form of activities of regulation, guidance, implementation, supervision in every form and pattern of handling.

Keywords: Settlement Quality, Family Economy, Youth Role, Pajukukang Fishermen



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah pesisir sepanjang 81.000 kilometer yang secara keseluruhan pantainya dihuni oleh banyak penduduk yang tersebar di desa-desa nelayan yang sangat banyak jumlahnya, yang tersebar disepanjang pesisir pantai. Desa-desa di pesisir pantai pada dasarnya memiliki perbedaan dalam karakteristiknya, ada desa nelayan yang bermata pencaharian sebagian besar pada perikanan laut, pada sektor pertanian, dan sektor perdagangan. Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan yaitu termasuk tinggi, menengah, dan rendah, dan masih banyak perbedaan karakteristik lainnya.

Menurut Adisasmita (2014), wilayah pesisir dihuni oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan dalam jumlah tidak besar berkisar antara sekitar ratusan sampai ribuan jiwa dan tersebar di seluruh wilayah pantai. Dalam melaksanakan kegiatan menangkap ikan di desa-desa nelayan yang kurang maju para nelayan menggunakan perahu-perahu penangkapan ikan yang pada umumnya berukuran kecil dan tidak bermotor, jarak jangkauan penangkapan ikan tidak jauh dari pantai, hasil tangkapan ikan yang diperoleh tidak banyak, alat perlengkapan yang digunakan relatif sederhana, hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat nelayan relatif sangat rendah, bahkan paling rendah

dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Selain dari itu tersedianya fasilitas pelayanan ekonomi, akses dan transportasi, pelayanan sosial, pelayanan dasar seperti listrik, air bersih, serta sanitasi masih kurang.

Permasalahan-permasalahan umum yang terjadi pada kawasan permukiman nelayan adalah permasalahan fisik yang dapat dilihat dari rendahnya aksesibilitas dan kekumuhan hunian. Sedangkan permasalahan non fisik adalah kemiskinan dan kesejahteraan yang rendah. Sela (2011) menegaskan bahwa karakteristik umum kawasan permukiman nelayan dapat ditinjau berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat, menempati lahan ilegal dan seringkali kurang memperhatikan kualitas lingkungan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada permukiman nelayan tidak lepas dari akibat kendala yang dialami oleh para nelayan terkait keterbatasannya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu hakikat pembangunan nasional, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Kesejahteraan yang tinggi mencerminkan kualitas hidup keluarga yang lebih baik. Kualitas hidup yang lebih baik tentunya berpengaruh pada kualitas hunian dan lingkungan para nelayan.

Menurut Kusnadi (2009), kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu (1) keterbatasan kualitas sumberdaya manusia; (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; (3) pembagian kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan nelayan buruh; (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; (5) ketergantungan yang sangat tinggi terhadap okupasi melaut; (6) gaya hidup yang dipandang boros dan kurang berorientasi ke masa depan.

Sedangkan pada permasalahan fisik permukiman nelayan yaitu rendahnya aksesibilitas dan kualitas hunian disebabkan ketidakmampuan nelayan membangun hunian yang layak akibat dari tingkat pendapatan yang rendah dan tidak menentu (Sela, 2011).

Melihat permasalahan tersebut maka permukiman nelayan perlu mendapat penanganan secara khusus yang tidak hanya berdampak pada penanganan permukiman dan hunian semata, melainkan bagaimana mengatasi kelangsungan hidup nelayan melalui dukungan sarana dan prasarana lingkungan yang tentunya mengatasi masalah kekumuhan dan kesejahteraan keluarga nelayan.

Penanganan permasalahan permukiman nelayan penting dilakukan mengingat keberadaan permukiman kumuh dan tidak teratur di pesisir Indonesia dapat berimplikasi terhadap paradigma buruk penyelenggaraan

pemerintahan, dengan memberikan citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Diharapkan seluruh wilayah pesisir Indonesia yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk permukiman nelayan mampu menciptakan kawasan permukiman nelayan yang sejahtera secara fisik dan non fisik. Termasuk Kabupaten Maros yang memiliki wilayah pesisir yang dihuni oleh masyarakat nelayan, juga memiliki permukiman nelayan, salah satunya yaitu permukiman Nelayan Pajukukang yang terletak di Kecamatan Bontoa.

Menurut Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Maros Tahun 2009-2028 terdapat 3 (tiga) skenario pengembangan permukiman, salah satunya permukiman yang ditata dan didukung pertumbuhannya. Permukiman yang ditata dan didukung pertumbuhannya adalah permukiman nelayan sepanjang aliran sungai dan pesisir pantai yang tumbuh cenderung tidak teratur dan menutup akses publik ke arah laut atau sungai. Posisi Permukiman Nelayan Pajukukang yang berada di pesisir laut dan sepanjang aliran sungai menjadi salah satu alasan dijadikannya sebagai permukiman yang perlu ditata dan didukung pertumbuhannya.

Keberadaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Maros tersebut sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032 yang mengamanatkan Kecamatan Bontoa termasuk

didalamnya Desa Pajukukang dan permukiman Nelayan Pajukukang, sebagai rencana strategis pengembangan Kawasan Minapolitan Bontoa. Kolaborasi kedua peraturan daerah yang ada sejak lebih kurang sepuluh tahun yang lalu, seharusnya telah menjadikan permukiman Nelayan Pajukukang sebagai permukiman nelayan yang tertata dengan baik dan jauh dari kekumuhan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, secara visual dapat digambarkan bahwa permukiman Nelayan Pajukukang tampak tidak terurus dan terkesan kumuh. Dengan mudah ditemui sampah berserakan di jalan, memenuhi saluran drainase, berserakan di lahan kosong, mengapung di tambak, bahkan di aliran sungai. Praktik buang air besar bukan pada tempatnya juga menjadi ciri visual dari permukiman ini. Cukup banyak ditemui rumah-rumah berdinding papan yang telah lapuk dan berlubang, pekarangan rumah dipenuhi sampah, potret rumah tidak layak dan tidak nyaman banyak ditemukan di permukiman ini.

Sebagian besar masyarakat Permukiman Nelayan Pajukukang bermata pencaharian sebagai nelayan migrasi musiman. Sebagai nelayan migran, tentunya kehidupan dan penghidupan nelayan tersebut bergantung pada hasil laut yang kenyataannya sukar mereka duga dan akibatnya menyebabkan penghasilan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga akan kehidupan yang layak. Terlebih mereka melakukan kegiatan mencari nafkah terbatas pada musim migrasi yaitu hanya enam bulan dalam setahun. Selama enam bulan nelayan akan

melaut dan berpindah sementara waktu di wilayah tangkapannya yaitu pesisir dan perairan kalimantan, dan selama enam bulan pula nelayan-nelayan tersebut akan kembali ke kampung halamannya dan kembali menghuni rumah mereka di Desa Pajukukang tanpa ada kegiatan mencari nafkah lagi.

Hasil tangkapan nelayan selama bermigrasi tersebut diperuntukan untuk menghidupi keluarga mereka selama setahun penuh, termasuk pada saat bermigrasi dan pada saat kembali. Kondisi keterbatasan ini tentunya berpengaruh terhadap perekonomian keluarga nelayan. Hal ini sejalan dengan data Profil Desa Pajukukang Tahun 2018 yang menyatakan bahwa sebagian besar Nelayan Pajukukang berpendapatan rendah.

Masa produktif yang hanya enam bulan dan tidak adanya diversifikasi kegiatan mencari nafkah menjadikan sebagian besar nelayan berada dalam tingkatan kurang sejahtera diikuti dengan penurunan kualitas lingkungan permukimannya (Made, 2011).

Meningkatkan kualitas lingkungan pada umumnya terjadi seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi penghuninya. Untuk itu diperlukan kondisi lingkungan permukiman yang responsive, yang mendukung pengembangan jati diri, produktifitas dan kemandirian masyarakat penghuninya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas peran masyarakat.

Kegiatan pembangunan di bidang permukiman dan prasarana wilayah khususnya di sektor perumahan dan permukiman selama ini telah mengacu pada konsep Tridaya. Konsep ini meliputi kegiatan penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi lokal/ masyarakat serta pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Konsep ini adalah merupakan bentuk partisipasi masyarakat nelayan dalam meningkatkan sumber dayanya, ekonominya dan kawasan lingkungan permukimannya karena inti dari konsep Tridaya ini adalah pemberdayaan masyarakat. Demikian pula dalam penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan permukiman nelayan, dimana konsep Tridaya digunakan sebagai dasar penyelenggaraannya (Sela, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji arahan peran pemuda dalam strategi peningkatan kualitas permukiman dan ekonomi keluarga pada studi kasus Permukiman Nelayan Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

B. Rumusan Masalah

Permukiman Nelayan Pajukukang merupakan permukiman yang dihuni oleh nelayan berpendapatan rendah, hal ini sejalan dengan fenomena masyarakat nelayan yang sering digolongkan sebagai kelompok masyarakat berpendapatan rendah oleh beberapa ahli dan

penelitian sebelumnya. Secara visual permukiman menampilkan ketidakteraturan dan kondisi kekumuhan, tidak terdapat prasarana pendukung yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Permukiman ini mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berbanding lurus dengan kualitas permukimannya. Walaupun permukiman Nelayan Pajukukang didukung pengembangannya oleh peraturan daerah Kabupaten Maros, namun hingga saat ini belum mampu menjadikan permukiman ini berada pada kondisi yang lebih baik. Demikian halnya potensi hasil laut dan perikanan yang tinggi di daerah tangkapan juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan baik dari segi pendapatan maupun hunian dan lingkungannya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kualitas permukiman dan kondisi ekonomi keluarga di Permukiman Nelayan Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros?
2. Bagaimana strategi peningkatan kualitas permukiman dan arahan peran pemuda dalam meningkatkan kualitas permukiman dan ekonomi keluarga di Permukiman Nelayan Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis kualitas permukiman dan kondisi ekonomi keluarga di Permukiman Nelayan Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
2. Untuk menyusun strategi peningkatan kualitas permukiman dan arahan peran pemuda dalam meningkatkan kualitas permukiman dan ekonomi keluarga di Permukiman Nelayan Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam penelitian selanjutnya terkait dengan tema.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rencana peningkatan kualitas permukiman dan ekonomi keluarga di lokasi penelitian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, adalah:

1. Lingkup Pembahasan

Penelitian ini difokuskan pada arahan strategi peningkatan kualitas permukiman dan tingkat ekonomi keluarga nelayan di Desa Nelayan Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Hasil penelitian akan

disusun untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas permukiman dan peran pemuda dalam peningkatan kualitas permukiman dan ekonomi keluarga nelayan. Adapun pembahasan dalam penelitian ini mencakup kondisi tata bangunan dan prasarana lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi serta strategi peningkatan dan arahan keterlibatan pemuda di dalamnya.

2. Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian berada di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Pada permukiman nelayan yang secara administratif berada pada wilayah Dusun Panaikang dan Dusun Parasangan Beru.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Permukiman

1. Rumah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Menurut *World Health Organization* (<https://kotaku.pu.go.id>wartaarsipdetil>) rumah diartikan sebagai struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu.

2. Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa:

- a. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- b. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

- c. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

3. Permukiman Kumuh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa:

- a. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- b. Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.
- c. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang

Menurut Nurmaida (2012) masalah permukiman kumuh adalah masalah multisektoral, menyangkut berbagai aspek dan berbagai sektor, antara lain aspek teknik, perencanaan, tata ruang, tata lingkungan, kehidupan sosial ekonomi, keagamaan, budaya, dll. Aspek-aspek tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Paradigma Ekonomi

Hal ini berkaitan dengan alokasi dan sumberdaya dan pemahaman bagaimana dimensi ekonomi berperan dalam pengadaan permukiman, yang mencakup:

- a) Kemampuan bayar; mencakup dana dan upaya, yaitu bagaimana membangkitkan kemampuan membayar kalangan berpendapatan rendah. Perlu dipikirkan bagaimana sistem pembayaran dan pinjaman.
- b) Biaya pengadaan; biaya struktur bangunan, prasarana lingkungan, kelembagaan dan biaya ekonomi. Semakin kecil biaya pengadaan, semakin banyak penduduk yang terlayani.
- c) Cara pembayaran; berkaitan dengan kesesuaian antara kemampuan membayar dengan biaya pembangunan.
- d) Kepemilikan; adanya jaminan kepemilikan, akan menjamin penduduk untuk tinggal.

- e) Fluktuasi ekonomi negara; harga rumah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Negara.

2. Paradigma Sosial

- a) Otonomi; perlunya keterlibatan penghuni dalam memutuskan perbaikan lingkungannya.
- b) Minat bersama; upaya menggalang masyarakat agar merasakan kebersamaan, untuk menciptakan lingkungan permukiman yang baik.
- c) Berkekuatan hukum; adanya rasa keamanan dalam kepemilikan dan aset.
- d) Efisiensi; dalam organisasi penyediaan, apabila dilakukan secara kekeluargaan jumlah rumah yang ditata kemungkinan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan cara baku.
- e) Mudah diadaptasikan; adaptasi secara responsif terhadap perubahan suatu lingkungan.

3. Paradigma Fisik

- a) Lahan; berkaitan dengan kepemilikan lahan dan kemudahan lokasi terhadap faktor ekonomi.
- b) Lingkungan bersama; berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan bersama (neighbourliners).
- c) Rumah dan ruang yang sesuai dengan kebutuhan penghuni, baik budaya, ekonomi maupun psikis.

- d) Teknologi yang digunakan; penggunaan teknologi tepat guna yang fleksibel, mencakup kemungkinan adanya partisipasi penghuni maupun masyarakat.

4. Permukiman Nelayan

Permukiman nelayan merupakan lingkungan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana dasar yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki akses dan keterikatan erat antara penduduk permukiman nelayan dengan kawasan perairan sebagai tempat mereka mencari nafkah, meskipun demikian sebagian dari mereka masih terikat dengan daratan (Umbara, 2003)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan, perumahan kawasan nelayan atau selanjutnya disebut kawasan nelayan adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan.

B. Penilaian Permukiman Kumuh

Badan Pusat Statistika (BPS) memiliki kriteria terhadap permukiman kumuh yaitu lingkungan hunian dan usaha yang ditandai dengan banyaknya rumah yang tidak layak huni, banyaknya saluran pembuangan limbah yang macet, penduduk/bangunan yang sangat

padat, banyak penduduk buang air besar tidak di jamban, dan biasanya berada di area marjinal. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penilaian terhadap kualitas permukiman dapat dilihat dari pemenuhan permukiman terhadap 7 (tujuh) indikator penilaian, yaitu Bangunan gedung, Jalan lingkungan, Penyediaan air minum, Drainase lingkungan, Pengelolaan air limbah, Pengelolaan persampahan, dan Proteksi kebakaran.

Identifikasi satuan permukiman merupakan tahap identifikasi untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman swadaya dari setiap lokasi. Identifikasi kondisi kekumuhan merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukani permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Identifikasi kondisi kekumuhan dilakukan berdasarkan Indikator Permukiman Kumuh.

1. Indikator Penilaian Tingkat Kekumuhan

Penilaian Kualitas Permukiman berdasarkan penilaian kriteria Permukiman Kumuh oleh Peraturan Menteri Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dilakukan dengan penentuan menggunakan kriteria. Adapun kriteria perumahan dan permukiman kumuh dapat ditinjau dari indikator:

- a. Bangunan gedung;
- b. Jalan lingkungan;
- c. Penyediaan air minum;
- d. Drainase lingkungan
- e. Pengelolaan air limbah;
- f. Pengelolaan persampahan; dan
- g. Proteksi kebakaran.

Kemudian kriteria kekumuhan dari ketujuh indikator kekumuhan mencakup:

a) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, mencakup:

a) Ketidakteraturan bangunan;

Kondisi ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:

- tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
- tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan; Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau

b) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

c) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Persyaratan teknis bangunan gedung terdiri dari:

- pengendalian dampak lingkungan;
- pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;
- keselamatan bangunan gedung;
- kesehatan bangunan gedung;
- kenyamanan bangunan gedung; dan
- kemudahan bangunan gedung.

b) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

- jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
 - kualitas permukaan jalan lingkungan buruk; merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.
- c) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum, mencakup:
- ketidaktersediaan akses aman air minum; merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
 - tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku; merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.
- d) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan, mencakup:
- drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun;
 - ketidaktersediaan drainase, merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia;

- tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.;
 - tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya, merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa: a. pemeliharaan rutin; dan/atau b. pemeliharaan berkala.;
 - kualitas konstruksi drainase lingkunganburuk, merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.
- e) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah, mencakup:
- sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku, merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat;
 - prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau b.

tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

f) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan, mencakup:

- prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut: (a) tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; (b) tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; (c) gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan (d) tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.;
- sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) pewadahan dan pemilahan domestik; (b) pengumpulan lingkungan; (c) pengangkutan lingkungan; dan (d) pengolahan lingkungan.;
- tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

Ditandai dengan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin; dan/atau pemeliharaan berkala.

g) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran, mencakup ketidakterediaan:

- prasarana proteksi kebakaran, merupakan kondisi dimana tidak tersedianya: (a) pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan; (b) jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran; (c) sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau (d) data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses;
- sarana proteksi kebakaran yang terdiri dari: (a) Alat Pemadam Api Ringan (APAR); (b) kendaraan pemadam kebakaran; (c) mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau (d) peralatan pendukung lainnya.

2. Formulasi Penilaian Kekumuhan

Proses penilaian diawali dengan mengidentifikasi lingkup perumahan dan permukiman dengan menentukan kondisi permukiman dengan kriteria dan indikatornya, berdasarkan parameter penilaiannya. Adapun parameter penilaian tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Tabel 1. Formulasi Penilaian Kekumuhan

o	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
1	Kondisi Bangunan Hunian	Ketidakteraturan Bangunan	Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3			
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1			
		Kepadatan Bangunan	KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi,	76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentua	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
		51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3			
		25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1			
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan: pengendalian dampak lingkungan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Dokumen, Format Isian,

o	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
			<p>pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung</p>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan tekni	3	Observasi
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
				25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
				25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Dokumen, Format Isian,

o	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
			berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	Observasi
				25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
				25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
				25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
			Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5

o	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
			atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	Isian, Observasi
				25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	
		Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
				25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
		Tidak terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannyapemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 2. pemeliharaan berkala	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	
				25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	Dokumen, Format Isian,

o	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
			karena telah terjadi kerusakan	51% - 75% area memiliki kualitas kontraksi drainase lingkungan buruk	3	Observasi
				25% - 50% area memiliki kualitas kontraksi drainase lingkungan buruk	1	
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
				25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	

o	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
				25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
				25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	

o	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 2. pemeliharaan berkala	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3	
				25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan 5. bangunan pos kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
				25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
		Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. mobil pompa; 3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 4. peralatan pendukung lainnya	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Dokumen, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
				25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	

C. Bangunan dan Prasarana Permukiman

1. Bangunan

a. Keteraturan Bangunan

Komponen keteraturan bangunan meliputi:

- Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line).
- Tinggi Bangunan Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
- Jarak Bebas Antarbangunan Jarak bebas antarbangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan, minimal 4 meter.

b. Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan adalah jumlah bangunan diatas satu luasan lahan tertentu, dinyatakan dengan bangunan/ha. Menurut Peraturan Menteri Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepadatan bangunan dikatakan tinggi jika berada pada angka diatas 200 unit/Ha.

2. Jaringan Jalan Lingkungan

Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Klasifikasi jalan di lingkungan perumahan selengkapnya dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Standar Pelayanan Minimal Jaringan Jalan Permukiman

Jenis Jalan	Lebar Jalan (m)	Perkerasan	Keterangan
Jalan Lokal I	3-7	Aspal/Beton	Akses ke semua lingkungan
Jalan Lokal II	3-6	Aspal/Beton	Akses ke semua lingkungan
Lingkungan I	1,5-2	Aspal/beton	Akses ke semua lingkungan
Lingkungan II	1,2	Paving	Akses ke semua lingkungan/ rumah
Setapak	0,8-2	paving	Akses ke semua persil rumah

Sumber : Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

3. Jaringan Drainase

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara

perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Perencanaan sarana dan prasarana drainase di lingkungan permukiman menurut Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam tabel berikut ini:

- a) tinggi genangan rata-rata kurang dari 30 cm
- b) lama genangan kurang dari 1 jam
- c) setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air.
- d) sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima (saluran kota, sungai, danau, laut atau kolam yang mempunyai daya tampung cukup) yang dapat menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud pengeringan daerah dapat terpenuhi.
- e) prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit

4. Jaringan Air Limbah/ Sanitasi

Sanitasi merupakan aspek penting pada permukiman. Permukiman padat dikenal dengan sistem sanitasi yang kurang baik dari segi ketersediaan prasarana MCK ataupun sistem pembuangannya. Terbatasnya lahan di permukiman padat, menjadi

pembangunan MCK umum sebagai pilihan tepat. Berdasarkan SNI 03-2399-2002 Tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum, berbagai aspek harus diperhatikan di antaranya :

- a. Jarak maksimal antara lokasi MCK umum dengan rumah penduduk yang dilayani adalah 100 meter. Lokasi daerah harus bebas banjir.
- b. Sumber air yang digunakan seperti :
 - 1) PDAM;
 - 2) Air tanah. Sumber air tanah dapat berupa sumur bor dan sumur gali;
 - 3) Air hujan; dan
 - 4) Mata air.
- c. Banyaknya ruangan dengan fungsi mandi, cuci kakus yang harus disediakan berdasarkan jumlah pemakai dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Banyaknya ruangan di MCK umum

Jumlah Pemakai (Orang)	Banyaknya Ruangan		
	Mandi	Cuci	Kakus
10-20	2	1	2
21-40	2	2	2
41-80	2	3	4
81-100	2	4	4
101-120	4	5	4
121-160	4	5	6
161-200	4	6	6

Sumber : SNI 03-2399-2002 Tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum, Halaman 3

5. Jaringan Air Bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Beberapa persyaratan, kriteria, dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah :

a. Penyediaan kebutuhan air bersih

Syarat kesehatan air minum sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan antara lain: (1) Persyaratan fisika: sifat fisik air seperti bau, warna, kandungan zat padat, kekeruhan, rasa, dan suhu; (2) Persyaratan mikrobiologis: kandungan bakteri dalam air yaitu bakteri E-Coli dan bakteri koliform; (3) Persyaratan kimiawi: kandungan mineral dalam air seperti arsen, fluorida, sianida, khlorin, alumunium, mangan dan mineral lainnya.

b. Kebutuhan air minum

Kebutuhan minimal adalah 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air minum dapat dipenuhi dengan Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) maupun Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP).

6. Jaringan Persampahan

Elemen-elemen perencanaan yang harus disediakan adalah gerobak sampah, bak sampah, tempat pembuangan sementara (TPS), dan tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun terkait dengan kebutuhan prasarana persampahan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Kebutuhan Prasarana Persampahan

Jenis Peralatan	Volume (m3)	KK	Jiwa
Wadah Individual	-	1	5
Wadah Komunal	0,5-1,0	20-40	100-200
Komposer Komunal	0,5-1,0	10-20	50-100
Gerobak Sampah	1	128	640
Container amroll truk	6-10	640-1.375	3.200-5.330

Sumber: Standar Nasional Indonesia Nomor 3242-2008 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman

7. Proteksi Kebakaran

Penyediaan hidran kebakaran

- 1) Untuk daerah komersial jarak antara kran kebakaran 100 meter;
- 2) Untuk daerah permukiman jarak antara kran maksimum 200 meter;
- 3) Jarak dengan tepi jalan minimum 300 meter;

D. Penanganan Permukiman

Menurut Setijanti dalam Butar (2012), ada tiga pendekatan dalam upaya penanganan permukiman, diantaranya :

1. Pendekatan partisipatori yakni pendekatan yang mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang memfokuskan pada permintaan lokal, perubahan perilaku dan yang mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaannya. Selain itu menurut Siagian dalam Butar (2012), keberhasilan kegiatan pembangunan akan lebih terjamin apabila seluruh warga masyarakat membuat

komitmen untuk turut berperan sebagai pelaku pembangunan dengan para pemuka masyarakat sebagai panutan, pengarah, pembimbing dan motivator. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat luas mutlak diperlukan oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan tersebut.

Pentingnya partisipasi dalam pembangunan dikemukakan juga oleh Sudriamunawar dalam Butar (2012) yakni :

- a. Dengan peran serta masyarakat akan lebih banyak hasil kerja yang dicapai;
 - b. Dengan peran serta masyarakat pelayanan atau servis dapat diberikan dengan biaya murah;
 - c. Peran serta masyarakat memiliki nilai dasar yang sangat berarti dalam menjalin persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat;
 - d. Peran serta masyarakat merupakan katalisator untuk kelangsungan pembangunan selanjutnya;
 - e. Peran serta masyarakat dapat menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan di masyarakat; dan
 - f. Peran serta masyarakat lebih menyadarkan masyarakat itu sendiri terhadap penyebab dan kemiskinan sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengatasinya.
2. Pembangunan berkelanjutan yakni pendekatan yang dilaksanakan dengan menaruh perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang terintegrasi dalam satu kesatuan

sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan.

3. Pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang yakni pendekatan pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman padat merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota dan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota secara integral.

1. Penanganan Permukiman Kumuh Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011

Penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan langkah pencegahan dan peningkatan. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati,

menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

- a. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup: (1). ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; (2). ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; (3). penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan (4) pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Langkah pencegahan ini dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali.

Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

2. Penanganan Permukiman Kumuh Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016

Terkait dengan pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dapat diidentifikasi penanganan fisik untuk bangunan dan lingkungan serta prasarana dan sarana sesuai dengan bentuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Permukiman Kumuh

No.	Program Penangan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
1	Bangunan Gedung	Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun	Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun □ Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung	Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya
2	Jalan Lingkungan	Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan	Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan □ Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung	Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang
3	Penyediaan Air Minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unitunit air baku, unit	Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan □ Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan	Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum

No.	Program Penangan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
		produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung	
4	Drainase Lingkungan	Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen goronggorong, perbaikan struktur drainase	Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan goronggorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. □ Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung	Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase
5	Pengelolaan Air Limbah	Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S	Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S □ Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPALT	Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah

No.	Program Penangan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
		seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.		
6	Pengelolaan Persampahan	Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. □ Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampa	Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sector pengelolaan sampah
7	Proteksi Kebakaran	Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran □ Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran	Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran

E. TURBINLAKWAS (Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)

Penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, mengarah pada pendekatan konsep pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau lebih dikenal dengan Turbinlakwas.

1. Pengaturan adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
2. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembinaan dilaksanakan melalui:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Penelitian dan pengembangan;
 - e. Pengembangan sistem informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - f. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

3. Pelaksanaan adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Pengawasan adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

F. Partisipasi Pemuda

1. Partisipasi

Menurut Pidarta dalam Astuti (2009), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Hetifah dalam Handayani (2006) berpendapat, "Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal". Sedangkan menurut Histiraludin dalam Handayani (2006) "Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan". Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap

program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

2. Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia Pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Menurut mukhlis (2007) “pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”.

a. Nelayan

Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan (Widodo, 2006). Menurut Mulyadi (2005) Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggiran pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Sedangkan menurut UU No.45 Tahun 2009 – Perikanan, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

b. Nelayan Muda

Dalam penelitian ini nelayan muda adalah orang atau komunitas yang berusia 16-30 tahun yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan budidaya dan menangkap ikan.

3. Partisipasi Pemuda

Oktavijani (2013) pula menentukan bahwa pemuda sebagai generasi penerus juga memiliki kemampuan potensial yang bisa diolah menjadi

kemampuan aktual. Selain itu juga memiliki potensi kecerdasan intelektual, emosi dan sosial, berbahasa, dan kecerdasan seni yang bisa diolah menjadi kecerdasan aktual yang dapat membawa mereka kepada prestasi yang tinggi dan kesuksesan. Mereka memiliki potensi moral yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi moral yang positif sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara yang penuh dengan kejujuran, tidak korup, semangat yang tinggi dan bertanggungjawab.

Karina (2008) menuliskan analisa kepemudaan dalam konsep dapat ditinjau dari tiga dimensi, yaitu: Pertama, dimensi pembangunan nasional yang dalam konteks ini generasi muda diarahkan untuk dipersiapkan untuk menjadi kader-kader bangsa yang utuh dan paripurna. Kedua, dimensi kebutuhan pembangunan yang diharapkan kader-kader sebagai angkatan kerja yang berbudi, dinamis, kreatif, terampil, berjiwa pengabdian dan berjiwa kepeloporan serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Ketiga, dimensi regenerasi, diharapkan kader-kader menjadi patriot bangsa, penerus nilai-nilai serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Karina (2008), pemuda memiliki tanggungjawab atas masa depan pembangunan bangsa, sebagaimana dicatat dalam "Deklarasi Pemuda Indonesia" bahwa, *"Pemuda Indonesia adalah ahli waris cita-cita bangsa yang sah dan sekaligus adalah generasi penerus, yang telah ikut meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan*

melewati simponi perjuangan yang panjang". Pemuda adalah ahli waris yang sah, sekaligus adalah generasi penerus yang memiliki tanggung jawab besar, dengan demikian memiliki moralitas (integritas), komitmen dan kesungguhan dalam mengimplementasikan tanggung jawabnya tersebut.

G. Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah mengamanatkan pembangunan kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

1. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
2. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda
3. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
4. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

H. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan peneliti dengan segala keterbatasannya, hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian secara khusus tentang “Arahan Peran Pemuda dalam Startegi Peningkatan Kualitas Permukiman dan Ekonomi Keluarga Nelayan di Permukiman Nelayan Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros”.

Namun, beberapa penelitian berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman nelayan dan kesejahteraan nelayan terdahulu, diantaranya yaitu:

1. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Di Propinsi Bali”, oleh I Ketut Alit, Jurnal Permukiman Natah (2005);
2. “Konsep Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Ngemplakrejo sebagai Dampak Pengembangan Kota Pasuruan”, oleh Dwi Walojo, Johan Silas, Haryo Sulistiyarso, ITS Surabaya Indonesia (2010);
3. “Partisipasi Masyarakat melalui Penataan Permukiman Nelayan dalam Meningkatkan Properti Komunitas”, Rieneke L.E Sela, Universitas Sam Ratulangi (2011);

I Ketut Alit dalam jurnal yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Di Propinsi Bali”, meneliti pemberdayaan masyarakat dalam usaha meningkatkan

kualitas lingkungan permukiman kumuh di Provinsi Bali. Penelitian ini menghasilkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas permukiman. Penelitian I Ketut Alit dan penelitian ini sama-sama membahas upaya peningkatan kualitas permukiman dengan pemberdayaan masyarakat, namun penelitian saat ini lebih khusus ke pemberdayaan pemuda sebagai masyarakat, perbedaannya juga terdapat pada metode penelitiannya, penelitian I Ketut Alit tidak mencari tahu kondisi faktual suatu lokasi dan sedangkan penelitian ini terlebih dahulu menganalisis kondisi faktual atau tingkat kualitas permukiman. Variabel penelitian juga berbeda di kedua penelitian ini.

Penelitian Dwi Walojo, Dkk yang berjudul “Konsep Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Ngemplakrejo sebagai Dampak Pengembangan Kota Pasuruan”, meneliti kondisi dan karakteristik permukiman ditinjau dari sarana dan prasarana pendukung, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, kemudian menghasilkan konsep penataan kawasan permukiman nelayan. Terdapat kesamaan variabel penelitian diantara penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Dwi Walojo, Dkk. Juga penelitian yang sama-sama dilakukan terhadap permukiman nelayan namun berbeda lokasi.

Penelitian Rieneke L.E. Sela yang berjudul “Partisipasi Masyarakat melalui Penataan Permukiman Nelayan dalam Meningkatkan Properti Komunitas”, meneliti tentang konsep penataan permukiman nelayan

melalui partisipasi masyarakat, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah partisipasi dikhususkan kepada peran pemuda, bukan masyarakat secara umum.

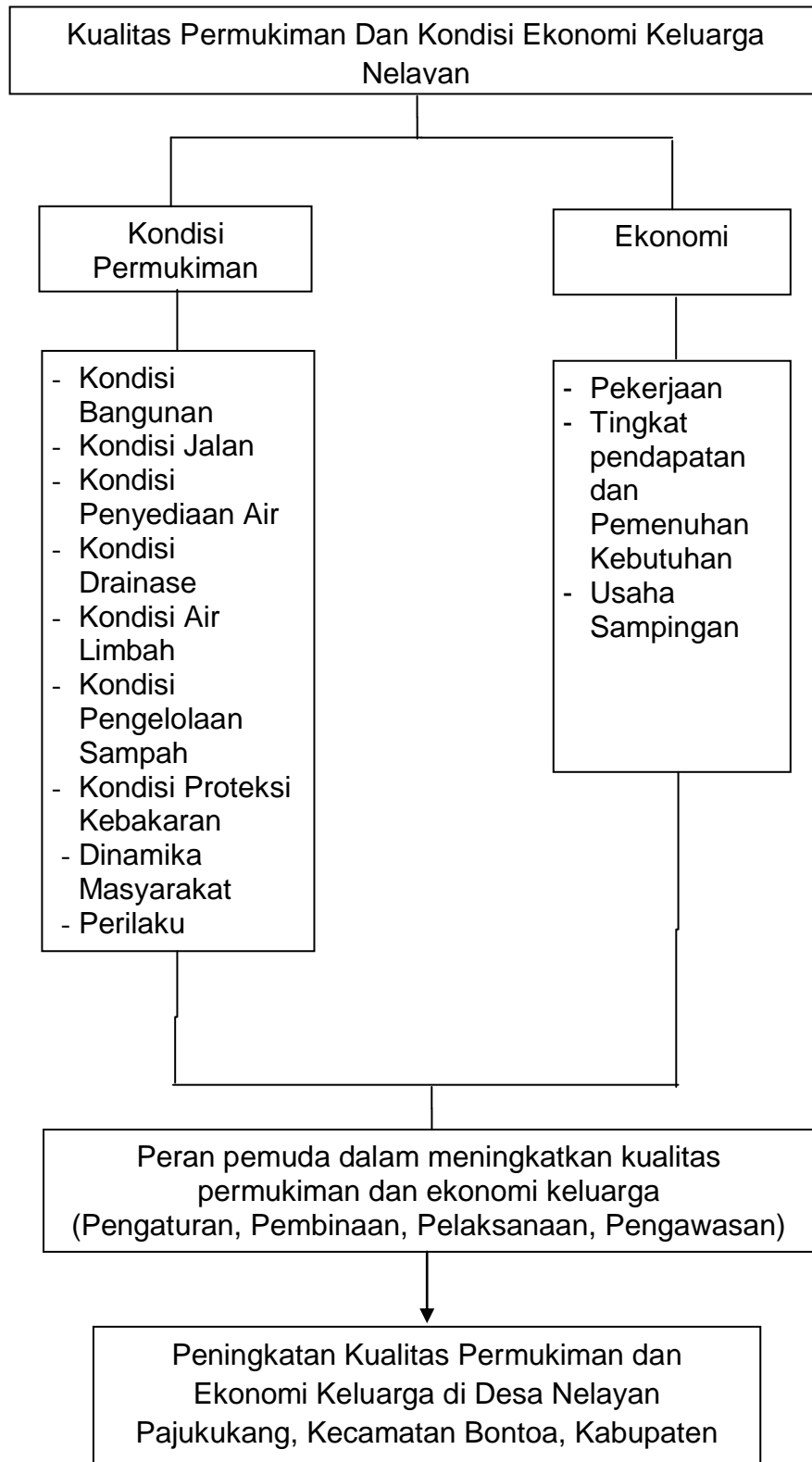
Ketiga penelitian tersebut menjadi bahan acuan bagi peneliti, dalam menganalisis kualitas permukiman dan menyusun bentuk partisipasi pemuda sebagai masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman dan ekonomi keluarga nelayan. Sekaligus menjadi bukti kebaruan penelitian ini.

Tabel 6. Perbandingan terhadap Penelitian Terdahulu

Judul dan Sumber Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Output	Persamaan	Perbedaan / Kebaruan	Keterangan
<p>Jurnal: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Di Propinsi Bali</p> <p>Oleh: I Ketut Alit (Jurnal Permukiman Natah, 2005)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Peningkatan Kualitas Kumuh - Konsep Penanganan Permukiman Kumuh - Bentuk Pemberdayaan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Kualitatif Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep penanganan permukiman kumuh - Bentuk pelibatan masyarakat dalam konsep penanganan permukiman kumuh 	<p>Sama-sama menyusun usaha peningkatan kualitas permukiman kumuh Dengan pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Penelitian sekarang dilakukan di permukiman nelayan dan masyarakat yang diberdayakan lebih terkhusus ke pemuda</p>	<p>Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan masyarakat dalam penangan kumuh dipenelitian I Ketut, menjadi salah satu acuan dalam menyusun arahan peran pemuda</p>
<p>Jurnal: Konsep Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Ngemplakrejo sebagai Dampak Pengembangan Kota Pasuruan</p> <p>Oleh: Dwi Walojo, Johan Silas,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Bangunan dan Lingkungan - Prasarana Lingkungan Sosial Masyarakat - Ekonomi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Kualitatif dan Kuantitatif - Analisis Kualitatif dan Kuantitatif - Analisis Deskriptif - Analisis Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - perkembangan mengikuti pola jalan - Sarana prasarana sudah memenuhi standar - Faktor pendorong adalah kekerabatan - Faktor penarik 	<p>Sama-sama mencari karakteristik permukiman, ketersediaan sarana, dan faktor pendorong kekumuhan.</p>	<p>Penelitian sekarang berlokasi di Desa Pajukukang, Kabupaten Maros, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan.</p>	<p>Konsep penataan dari penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan konsep dalam penelitian sekarang.</p>

Judul dan Sumber Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Anlisis	Output	Persamaan	Perbedaan / Kebaruan	Keterangan
Haryo Sulistiyarso (ITS Surabaya, 2010)			adalah lokasi kerja dekat, biaya transportasi murah			
<p>Tesis: Partisipasi Masyarakat melalui Penataan Permukiman Nelayan dalam Meningkatkan Properti Komunitas</p> <p>Oleh: Rieneke L.E Sela, (Universitas Sam Ratulangi, 2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Masyarakat - Tata Bangunan - Permukiman nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Deskriptif - Analisis Komparatif - Analisis SWOT 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep penataan permukiman kumuh berbasis partisipasi 	Sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman	Penelitian terdahulu membahas partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian sekarang mengkhhususkan partisipasi pemuda.	Konsep penataan dari penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan konsep dalam penelitian sekarang.

I. Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan yang ada, maka studi ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat *research and development* yang mencakup penelitian dengan jenis penelitian metode campuran (*mix method*). Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mngkombinasikan antara penelitain kualitatif dengan penelitian kuantitatif, pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitaif, dan campuran kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian (Creswell, 2017).

Pada penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu kondisi permukiman digunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif dengan sifat kausal komparatif untuk mendeskripsikan serta menganalisis berbagai fenomena yang ada dan membandingkannya dengan teori yang ada beserta data yang diperoleh dari pengambilan data primer dan kunjungan institusional dan studi literatur yang berkaitan. Kemudian untuk kondisi sosial dan ekonomi keluarga dijawab dengan penedekatan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah kedua digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.